



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Maret 2023/Periodik - 2022)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA  
DAN EKONOMI KREATIF  
**UNIT KERJA** : PUSAT PENGEMBANGAN SDM PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : FAISAL
2. Jabatan : KEPALA PUSAT
3. NHK : 643607

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 2.467.500.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 98 m2/90 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 1.050.000.000
2. Tanah Seluas 738 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 105.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 140 m2/100 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 892.500.000
4. Tanah Seluas 654 m2 di KAB / KOTA PANGKAJENE DAN KEPULAUAN, HASIL SENDIRI Rp. 420.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 251.750.000

1. MOTOR, HONDA VERZA Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 14.250.000
2. MOBIL, HONDA HRV Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 237.500.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. ----**D. SURAT BERHARGA** Rp. 300.000.000**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 155.000.000**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----**Sub Total** Rp. 3.174.250.000**III. HUTANG** Rp. 175.000.000**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 2.999.250.000

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id).



Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.